

KLAUSULA EKSONERASI PERJANJIAN ROBOT TRADING DALAM SISTEM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Oleh:

M. Hendriansyah Raihan

Mochammad Tanzil Multazam

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juni, 2026



Pendahuluan

Latar Belakang

- Perkembangan teknologi finansial mendorong penggunaan robot trading dalam kegiatan investasi digital. Robot trading bekerja menggunakan algoritma yang dapat melakukan transaksi secara otomatis. Dalam praktiknya, perjanjian robot trading sering memuat klausula eksonerasi yang membatasi atau menghapus tanggung jawab penyedia layanan. Kondisi ini berpotensi merugikan konsumen karena posisi tawar konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 melarang klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.

Urgensi Penelitian

- Terjadi potensi konflik norma antara Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana pengaturan klausula eksonerasi dalam perjanjian robot trading berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022?
2. Apakah klausula eksonerasi dalam perjanjian robot trading sesuai dengan sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menerapkan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Analitis (Analytical Approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi. Bahan hukum sekunder seperti literatur, artikel jurnal, buku hukum, dan pendapat ahli yang mendukung penelitian ini. Analisis dilakukan secara deduktif melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan argumentatif untuk menilai kesesuaian norma serta mengidentifikasi konflik norma.

Hasil

Pengaturan Klausula Eksonerasi dalam Robot Trading

- Perjanjian robot trading menggunakan kontrak elektronik berbentuk perjanjian baku.
- Dalam kontrak tersebut ditemukan klausula eksonerasi yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha.
- Peraturan Bappebti No. 12 Tahun 2022 memberikan ruang penggunaan klausula pembatasan tanggung jawab sepanjang memenuhi prinsip transparansi.
- Pasal 18 UUPK melarang klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.

Contoh:

"Segala risiko kerugian investasi menjadi tanggung jawab pengguna."

Kesimpulan:

Terdapat perbedaan pengaturan mengenai klausula eksonerasi antara regulasi sektoral dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pembahasan

Analisis Klausula Eksonerasi dalam Robot Trading

- Klausula eksonerasi merupakan klausula yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.
- Peraturan Bappebti No. 12 Tahun 2022 memberikan ruang penggunaan klausula pembatasan tanggung jawab sepanjang memenuhi prinsip transparansi.
- Namun, Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 melarang klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.
- Dalam kontrak robot trading, konsumen berada pada posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian.

Kesimpulan Analisis:

- Terdapat potensi ketidaksesuaian antara klausula eksonerasi dalam perjanjian robot trading dengan prinsip perlindungan konsumen.

Pembahasan

ANALISIS KONFLIK NORMA DAN IMPLIKASI HUKUM

- Peraturan Bappebti No. 12 Tahun 2022 Memungkinkan pembatasan tanggung jawab pelaku usaha (dengan prinsip transparansi)
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Melarang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen)

KONFLIK NORMA VERTIKAL

Penyelesaian:

Lex Superior Derogat Legi Inferiori

(Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah)

Implikasi Hukum:

- Ketentuan dalam UUPK harus diutamakan karena memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
- Klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen berpotensi dinyatakan batal demi hukum.
- Pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.
- Diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Temuan Penting Penelitian

- Klausula eksonerasi masih digunakan dalam perjanjian robot trading sebagai instrumen pembatasan tanggung jawab pelaku usaha.
- Peraturan Bappebti No.12 Tahun 2022 memberikan ruang penggunaan klausula tersebut sepanjang memenuhi prinsip transparansi.
- Pasal 18 UUPK secara tegas melarang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.
- Terjadi konflik norma secara vertikal antara regulasi sektoral dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- Berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, ketentuan UUPK harus diutamakan sehingga klausula eksonerasi yang bertentangan dengan UUPK berpotensi batal demi hukum.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis

- Menambah kajian hukum mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian robot trading.
- Memberikan analisis mengenai hubungan antara hukum perlindungan konsumen dan regulasi perdagangan berjangka berbasis teknologi.
- Menjadi referensi akademik dalam penyelesaian konflik norma pada sistem hukum Indonesia.

Manfaat Praktis

Bagi Konsumen/Investor

- Memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap klausula yang merugikan konsumen.

Bagi Pelaku Usaha

- Menjadi pedoman dalam penyusunan perjanjian robot trading yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Bagi Regulator

- Menjadi bahan evaluasi untuk harmonisasi regulasi sektoral dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna menciptakan kepastian hukum.

Referensi

- [1] Lawrence Damilare Oyeniyi, Chinonye Esther Ugochukwu, dan Noluthando Zamanjomane Mhlongo, "Analyzing the impact of algorithmic trading on stock market behavior: A comprehensive review," *World J. Adv. Eng. Technol. Sci.*, vol. 11, no. 2, hlm. 437–453, Apr 2024, doi: 10.30574/wjaets.2024.11.2.0136.
- [2] A. D. Sari dan M. T. Multazam, "Legal Consequences of Using Trading Robots for Capital Market and Commodity Futures Market Players [Akibat Hukum Penggunaan Robot Trading Bagi Para Pelaku Pasar Modal dan Pasar Berjangka Komoditi]", *Acopen UMSIDA*, 2023, doi: <https://doi.org/10.21070/ups.2208>
- [3] et al Nipa Akter, "Consumer Protection Laws and Business Ethics: A Comparative Study of Local and International Practices," *Agu* 2025, doi: 10.5281/ZENODO.16918484.
- [4] Cahya Purnama Asri, Bhenu Artha, Bahri, "Problematics of Consumer Protection in Business Activities", Vol. 4, No. 1, 2022, doi: <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v4i1.545>
- [5] M. Aquaria Putri S, "Klausula Baku dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *J. Gagasan Huk.*, vol. 2, no. 02, hlm. 122–134, Des 2020, doi: 10.31849/jgh.v2i02.8553.

Referensi

- [6] Dewi Ekuwi Vina, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Afiliator Robot Trading Illegal DNA Pro di Indonesia," *Coll. Stud. J.*, vol. 6, no. 1, hlm. 223–232, Jun 2023, doi: 10.56301/csj.v6i1.889.
- [7] F. Fahmi Namakule, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Robot Trading di Indonesia: (Studi Kasus Pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi-Bappebti)," *J. Locus Penelit. Dan Pengabd.*, vol. 3, no. 4, hlm. 297–317, Apr 2024, doi: 10.58344/locus.v3i4.2564.
- [8] P. B. J. Wijaya dan I. W. N. Purwanto, "Perlindungan Hukum Perdata Bagi Investor Terhadap Investasi Bodong Berbasis Teknologi pada Kasus Robot Trading Fahrenheit di Indonesia", vol. 3, no. 12, 2025, doi: <https://doi.org/10.62281/5jkda674>
- [9] A. S. Dewi, I. Syafitri, dan M. Husni, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku Perumahan: Tinjauan Strict Liability dan Klausula Eksonerasi," vol. 8, 2025, url: <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/15085>
- [10] Judika Simarmata¹, Andika Wijaya, Rizki Setyobowo Sangalang, "Legal Protection For Consumers Against The Exoneration Clause On The Goods Stated If The Goods Are Broken Or Damaged Is The Same As Buying In The Review Of Law Number 8 Of 1999 On Consumer Protection," *J. Law Polit. Humanit.*, vol. 5, no. 6, 2025, doi: <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2070>

Referensi

- [11] R. F. Soloti, S. Yodo, dan A. A. Rowa, "Eksistensi Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," vol. 9, no. 1, 2025, url: <https://repository.untad.ac.id/id/eprint/100442/>
- [12] H. Hassanah, W. Wahyudi, dan N. Abdul Aziz, "Standard Clause Problems in E-Commerce Based on Indonesian Civil Law," *J. Wawasan Yuridika*, vol. 7, no. 2, hlm. 221–238, Sep 2023, doi: 10.25072/jwy.v7i2.4226.
- [13] T. Gabriella Pohan, E. Soerjati Priowirjanto, dan T. Safiranita Ramli, "Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi pada Marketplace Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *COMSERVA J. Penelit. Dan Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 07, hlm. 2913–2923, Nov 2023, doi: 10.59141/comserva.v3i07.1075.
- [14] T. M. P. Suprpto dan I. M. D. Priyanto, "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi pada Tiket Parkir dalam Kasus Kehilangan Kendaraan di Area Parkir", *Restorative Journal*, vol. 2, no. 1, hlm 15-29, 2024, url: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/hukbis/article/viewFile/15797/7387>
- [15] W. O. H. Dhanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klausula Eksonerasi pada Jual Beli Online", *Restorative Journal*, vol. 2, no. 1, hlm 15-29, 2024, url: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/hukbis/article/viewFile/15797/7387>

Referensi

- [16] S. P. Referensi, "Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor", Vol. 2, No 2, 2025, doi: <https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.477>
- [17] H. Wijaya dan W. Yulianingsih, "Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Syarat Dan Ketentuan Aplikasi Trading Efek," *Leg. Spirit*, vol. 8, no. 3, hlm. 521–530, Nov 2024, doi: 10.31328/ls.v8i3.5524.
- [18] Ofis Rikardo, S. A. Purwadini, dan S. F. Maharany, "Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *J. Huk. Sasana*, vol. 10, no. 1, hlm. 162–179, Jun 2024, doi: 10.31599/sasana.v10i1.2110.
- [19] H. Fadhli, S. Sarip, R. Rohadi, dan N. Rahman, "Analisis Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior dalam Presidential Threshold dan Regent Treshold," *J. Jure Muhammadiyah Cirebon*, vol. 5, no. 2, hlm. 46–69, Des 2021, doi: 10.32534/djmc.v5i2.3174.
- [20] A. J. P. Banola, B. R. Imut, C. L. Klau, C. C. Totnay, F. Mas'ud, dan M. A. W. Wunu, "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia," *CONSTITUO J. State Polit. Law Res.*, vol. 4, no. 1, hlm. 68–79, Jun 2025, doi: 10.47498/constituo.v4i1.4949.
- [21] B. J. Podung, "Benturan Konflik Kepentingan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," vol. 22, no. 3, 2025, url: <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1310>
- [22] D. Budiman, "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi," vol. 8, no. 1, 2024, doi: <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12533>

